



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan perlindungan terhadap keamanan dan akses arsip dinamis, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1297);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
4. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
5. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip Dinamis.
6. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.

7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
9. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
10. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
11. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.

Pasal 2

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
- c. Pengamanan Arsip Dinamis.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu instrumen pengelolaan Arsip Dinamis pada Kementerian Perdagangan.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan:
 - a. sentralisasi dalam penetapan kebijakan; dan
 - b. desentralisasi dalam pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 4

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan pengelolaan Arsip Dinamis pada Kementerian Perdagangan; dan
- b. memberikan pedoman kepada pejabat fungsional arsiparis di Unit Pengolah dan/atau unit kerja dalam:
 1. melakukan pemberkasan Arsip Dinamis secara tertib;
 2. mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 3. melindungi fisik Arsip dan informasi yang termuat di dalam Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas Arsip tetap terjaga; dan

4. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;
- c. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- d. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh publik; dan
- e. menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang dikecualikan.

Pasal 5

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis mengacu pada kebijakan klasifikasi Arsip dengan menggunakan kode klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan fungsi unit kerja sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.
- (3) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis yang tercipta pada Kementerian Perdagangan diklasifikasikan dalam kategori:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan teknis pengamanan dan pengaturan akses.

Pasal 7

Arsip Dinamis pada Kementerian Perdagangan dapat diakses oleh:

- a. pengguna internal; dan
- b. pengguna eksternal.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. menteri;
 - b. wakil menteri;
 - c. pimpinan tinggi madya;
 - d. pimpinan tinggi pratama;
 - e. administrator dan pengawas;
 - f. pengawas internal;
 - g. perwakilan perdagangan di luar negeri; dan
 - h. pejabat fungsional.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Kementerian Perdagangan.

- (3) Pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang mengakses Arsip Dinamis yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya.
- (4) Pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakses Arsip Dinamis yang berada di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
- (5) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis yang berada di bawah kewenangannya dengan kategori Biasa/Terbuka.
- (6) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal, pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis setelah berkoordinasi dengan Unit Pengolah dan/atau unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengakses Arsip Dinamis pada Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Unit Pengolah dan/atau unit kerja.
- (3) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip Dinamis pada Kementerian Perdagangan yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1096), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP PADA KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
I. HUBUNGAN MASYARAKAT						
1.	HM.00	Penerangan dan Publikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap Masyarakat di bidang perdagangan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, mkonferensi pers (<i>press release</i>), media massa (televisi, radio dan tanggapan terhadap berita media massa termasuk layanan informasi publik	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
2.	HM.01	Dengar Pendapat (<i>hearing</i>) Dewan Perwakilan Rakyat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat (<i>hearing</i>) dengan Dewan Perwakilan Rakyat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan, Biro Humas
3.	HM. 02	Hubungan Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.00	Lembaga Negara Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.01	Organisasi Perdagangan Nasional Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan nasional, antara lain Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi dan Pelaku Usaha	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.02	Organisasi Perdagangan Internasional Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Hubungan Masyarakat

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		antara lain <i>Asia Pacific Economic Cooperataion</i> (APEC), <i>World Trade Organisation</i> (WTO) dan Masyarakat Economi Asean (MEA)			kinerja kementerian	
	HM.02.03	Perusahaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan pihak Perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta)	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.04	Organisasi Kemasyarakatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan organisasi kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.05	Perguruan Tinggi/Sekolah Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan perguruan tinggi atau sekolah, termasuk orientasi lapangan dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.06	Bakohumas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas)	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
4.	HM.03	Keprotokolan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	HM.03.00	Upacara atau Acara Kedinasan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	HM.03.01	Kunjungan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari Masyarakat	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.03.02	Agenda Pimpinan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan Biro Hubungan Masyarakat
5.	HM.04	Dokumentasi dan Penerbitan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan buletin, majalah, jurnal atau naskah sumber,	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		yang meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan penyebaran				
6.	HM.05	Penghargaan dan tanda kenang-kenangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang perdagangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
7.	HM.06	Ucapan Naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan Biro Hubungan Masyarakat
8.	HM.07	Dokumen Hosting Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan <i>website</i>	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hubungan Masyarakat
II. HUKUM						
1.	HK.00	Program Legislasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian Perdagangan maupun program legislasi nasional	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
2.	HK.01	Produk Hukum	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
	HK.01.00	Produk Hukum yang bersifat Pengaturan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan perundang undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap (Protap) atau <i>Standard Operation Procedure</i> , Surat Edaran di bidang perdagangan yang meliputi tahapan persiapan, Analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
	HK.01.01	Produk Hukum yang bersifat Penetapan Naskah yang berkaitan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu Keputusan tentang penetapan kegiatan dan Keputusan tentang penetapan pelaksanaan kegiatan di	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		bidang perdagangan sejak awal proses hingga penanda tangan				
3.	HK. 02	Perjanjian Kerja sama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
	HK. 02.00	Kerja sama Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri yang meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerja sama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
	HK.02.01	Kerja sama Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri yang meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerja sama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
4.	HK.03	Bantuan Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	HK.03.00	Bantuan Hukum Kasus Perdata Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang perdagangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
	HK.03.01	Bantuan Hukum Kasus Pidana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang perdagangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum Biro Advokasi Perdagangan
	HK.03.02	Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara di bidang perdagangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum Biro Advokasi Perdagangan
	HK.03.03	Advokasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pelayanan Advokasi Hukum dalam kasus hukum di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Advokasi Perdagangan
5.	HK.04	Telaah Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Hukum

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
					kinerja kementerian	
	HK.04.00	Telaah Hukum Internal Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Kementerian Perdagangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
	HK.04.01	Telaah Hukum Eksternal Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
6.	HK.05	Sosialisasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrument hukum kepada Lembaga dan perorangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
7.	HK.06	Dokumentasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, penyebarluasan dan penyebaran informasi hukum	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum
8.	HK.07	Hak Atas Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Hukum

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		masalah sampai dengan penyelesaian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.			kinerja kementerian	
9.	HK.08	Kasus Hukum Naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum peradilan tata usaha oleh Kementerian Perdagangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Hukum Biro Advokasi Perdagangan
III. KEPEGAWAIAN						
1.	KP.00	Formasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, rencana penempatan pegawai, rencana penetapan klasifikasi pendidikan, dan persetujuan formasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
2.	KP.01	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.01.00	Penerimaan Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, yang meliputi pengumuman penerimaan,	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penerimaan lamaran, pemanggilan, ujian dan pengumuman akhir penerimaan pegawai			kinerja kementerian	
	KP.01.01	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pemeriksaan kesehatan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.01.02	Prajabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.01.03	Penempatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
3.	KP.02	Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Jabatan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.02.00	Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.02.01	Ujian Dinas Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.02.02	Ujian Kompetensi Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
4.	KP.03	Mutasi	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.03.00	Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
					kinerja kementerian	
	KP.03.01	Kenaikan Gaji Berkala Naskah yang berkaitan dengan kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.03.02	Penyesuaian Masa Kerja Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.03.03	Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.03.04	Promosi Naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.03.05	Rotasi Kerja Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.03.06	Alih Tugas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas antara lain mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan dan pegawai yang diperbantukan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
5.	KP.04	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.04.00	Pengangkatan Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk pelantikan jabatan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.04.01	Pemberhentian Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural atau jabatan fungsional	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
6.	KP.05	Pendelegasian Wewenang	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.05.00	Pelaksana Tugas (Plt) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.05.01	Pelaksana Harian (Plh) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat <i>definitive</i> tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan)	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
7.	KP.06	Pengembangan Pegawai	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.06.00	Program Diploma Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program diploma.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.06.01	Program Sarjana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.06.02	Program Pasca Sarjana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Pasca Sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.06.03	Program Doktorat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Doktorat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Doktorat.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.06.04	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai tingkat Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan tingkat Fungsional Muda/Pengawas.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.06.05	Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
	KP.06.06	Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis yang meliputi perencanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis.			kinerja kementerian	
8.	KP.07	Administrasi Pegawai	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan SDM
	KP.07.00	Data dan Keterangan Pegawai Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.07.01	Kartu Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan SDM
	KP.07.02	Kartu Istri dan Kartu Suami Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan SDM
	KP.07.03	Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
					serta kemitraan dan reputasi	
	KP.07.04	Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Naskah yang berkaitan dengan pengurusan BPJS.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan SDM
	KP.07.05	Tanda Jasa Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisfikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
9.	KP.08	Pembinaan Pegawai	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.08.00	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.08.01	Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.08.02	Pembinaan Mental Naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk ceramah keagamaan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.08.03	Hukuman Disiplin Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang meliputi teguran	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat/golongan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.			kinerja kementerian	
10.	KP.09	Pembinaan Jabatan Fungsional	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.00	Fungsional Arsiparis Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional arsiparis, meliputi pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.01	Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.				
	KP.09.02	Jabatan Fungsional Widyaiswara Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional widyaiswara, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.03	Fungsional Peneliti Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional peneliti, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.04	Fungsional Perencana Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perencana, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.09.05	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang - undangan Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang - undangan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.06	Fungsional Auditor Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional auditor, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.07	Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.08	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata komputer, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.			kinerja kementerian	
	KP.09.09	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.10	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis perdagangan meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.11	Jabatan Fungsional Penera dan Pranata Laboratorium Kemetrolagian Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetensi Jabatan fungsional SDM kemetrolagian, <i>database</i> , evaluasi dan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/ <i>in-house</i> seminar jabatan fungsional.				
	KP.09.12	Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Pengawas Kemetrolagian Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan dan pemberhentian PPNS Metrologi Legal, diklat teknis dan fungsional, peraturan dibidang jabatan fungsional SDM kemetrolagian, standar kompetensi jabatan fungsional SDM kemetrolagian, <i>database</i> , serta evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.13	Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetensi jabatan fungsional penguji mutu barang, <i>database</i> , evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/ <i>in-house</i> seminar jabatan fungsional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.09.14	Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Perdagangan, <i>database</i> , evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/ <i>in-house</i> seminar jabatan fungsional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.09.15	Jabatan Fungsional Lainnya Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
11.	KP.10	Kesejahteraan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.10.00	Kesehatan Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, <i>general check up</i> pejabat.	Terbatas	Fungsional Muda/Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	KP.10.01	Cuti Naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.10.02	Rekreasi, Kesenian, dan Olahraga Naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	KP.10.03	Bantuan Sosial Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk bantuan sosial yang diberikan oleh dan/atau kepada pihak lain, dan sumbangan-sumbangan lainnya.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.10.04	Perumahan Naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Kementerian Perdagangan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
12.	KP.11	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.11.00	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hak pensiun, yang meliputi proses pengajuan permohonan sampai dengan ditetapkannya keputusan pensiun termasuk	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.				
	KP.11.01	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, meliputi proses pengajuan, proses pemberhentian sampai ditetapkannya keputusan pemberhentian pegawai.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
13.	KP.12	Organisasi Non Kedinasan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.12.00	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.12.01	Dharma Wanita Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.12.02	Koperasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Kementerian Perdagangan.			kinerja kementerian	
	KP.12.03	Yayasan Kementerian Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
	KP.12.04	Organisasi Lainnya Naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
IV. KEUANGAN						
1.	KU.00	Pelaksanaan Anggaran	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.00.00	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penyusunan DIPA, POK, dan revisi DIPA/POK.				
	KU.00.01	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan RAB.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.00.02	Penggajian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.00.03	Pengeluaran Anggaran Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, meliputi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SSP-TUP), Surat Kuasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/mechanisme pengelolaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bahan Nota Keuangan.				
2.	KU.01	Pengelolaan Perbendaharaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.01.00	Perbendaharaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara pengeluaran, dan Bendahara penerimaan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.01.01	Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan surat keterangan lainnya.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.01.02	Kartu Pengawasan Kredit Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat	Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		berupa kartu pengawasan kredit anggaran.			mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	
	KU.01.03	Pajak Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.04	Penerimaan Non Pajak Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.05	Pengembalian Belanja Naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, pengembalian belanja barang, dan pengembalian belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KU.01.06	Tagihan Penerimaan Negara Naskah yang berkaitan dengan penerimaan negara berupa pendapatan maupun pengembalian belanja melalui Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.01.07	Berita Acara Pemeriksaan kas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.01.08	Verifikasi Anggaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/ penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.01.09	Pembukaan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Pembantu (BKP), kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan realisasi anggaran.			kinerja kementerian	
3.	KU.02	Perhitungan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.03	Ketatausahaan Keuangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.03.00	Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.03.01	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KU.03.02	Permohonan Pinjaman Naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
	KU.03.03	Iuran Keanggotaan Organisasi Naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi tingkat nasional dan organisasi internasional, meliputi pendaftaran, pembayaran iuran anggota, dan laporan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
V. KETATAUSAHAAN						
1.	TU.00	Persuratan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/ stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	TU.00.00	Pengurusan Surat Masuk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pegurusan surat masuk	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.00.01	Pengurusan Surat Keluar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
2.	TU.01	Penggandaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
3.	TU.02	Kearsipan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.02.00	Pembinaan Kearsipan (Internal) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan teknis, dan fasilitasi fungsional Arsiparis.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	TU.02.01	Penyusunan Kebijakan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Kearsipan, yang meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dan kebijakan kearsipan lainnya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.02.02	Penggunaan Arsip Aktif Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan Arsip, seperti daftar Arsip Aktif, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.02.03	Pemindahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan Arsip.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.02.04	Pemusnahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan Arsip.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.02.05	Penyerahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan Arsip.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	TU.02.06	Layanan Arsip Inaktif Naskah yang berkaitan dengan layanan Arsip Inaktif seperti daftar Arsip Inaktif, peminjaman Arsip, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.02.07	Pemeliharaan/Perawatan Arsip Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/ perawatan Arsip.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	TU.02.08	Program Arsip Terjaga Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program Arsip terjaga.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
4.	KP.03	Rapat, Rapat Koordinasi, dan Rapat Kerja Teknis Naskah yang berkaitan dengan rapat, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat kerja teknis internal Kementerian Perdagangan, notulen, dan hasil pembahasannya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
5.	KP.04	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan Luar negeri termasuk	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pengurusan paspor, <i>visa</i> , <i>exit permit</i> , sampai dengan laporan perjalanan dinas.				
VI. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						
1.	OT.00	Organisasi Naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
2.	OT.01	Uraian Tugas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
3.	OT.02	Analisis Jabatan dan Beban Kerja Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
4.	OT.03	Mekanisme kerja Naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP) dan tata kerja termasuk berkas Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
5.	OT.04	Ketatalaksanaan Naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Organisasi dan SDM
VII. PERLENGKAPAN						
1.	PL.00	Perencanaan Kebutuhan Naskah yang berkaitan dengan usulan dan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaannya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
2.	PL.01	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.00	Perencanaan Pengadaan Naskah yang berkaitan dengan rangkaian proses/tahapan perencanaan pengadaan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisfikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PL.01.01	Tender dan tender cepat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.01.00	Perlengkapan Kantor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.01.01	Peralatan Kantor Naskah yang berkaitan dengan pengadaan peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.01.02	Tanah dan Bangunan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/ kekayaan (sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PL.01.01.03	Jasa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.01.04	Kendaraan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.01.05	Instalasi/Jaringan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, <i>Local Area Network</i> (LAN), dan sebagainya dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.01.06	Peralatan Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan perdagangan seperti perangkat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) mulai dari	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.				
	PL.01.02	Seleksi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.02.00	Konsultan Non Konstruksi Naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi, baik badan usaha maupun perorangan, yang proses pemilihannya melalui mekanisme seleksi dan <i>repeat order</i>	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.02.01	Konsultan Konstruksi Naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi, baik badan usaha maupun perorangan, yang proses pemilihannya melalui mekanisme seleksi dan <i>repeat order</i>	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PL.01.02.02	Penunjukan Langsung Naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa lainnya atau jasa konsultansi yang prosesnya melalui penunjukan langsung	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisfikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
3.	PL.02	Penggunaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan BMN.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
4.	PL.03	Pemanfaatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN mulai dari proses awal usulan sampai terbit izin pemanfaatan dan kontrak antar pihak.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
5.	PL.04	Distribusi dan penyimpanan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran BMN dari gudang serta pendistribusiannya untuk kepentingan intern maupun ekstern.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
6.	PL.05	Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemusnahan mulai dari proses awal usulan hingga terbitnya Berita Acara dan Surat Keputusan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
7.	PL.06	Penatausahaan dan Inventarisasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan maupun inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan, seperti Laporan Persediaan, Laporan BMN, dan Laporan Inventarisasi BMN	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
8.	PL.07	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penetapan kebijakan BMN baik kebijakan umum dan teknis serta kegiatan yang bersifat penertiban dan pemantauan/investigasi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Keuangan
VIII. PERENCANAAN						
1.	PR.00	Usulan Perencanaan Naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
2.	PR.01	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PR.01.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.01.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
3.	PR.02	Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.02.00	Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perdagangan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PR.02.01	Perjanjian Kinerja Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian kinerja dengan atasan langsung seperti Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Pratama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan dengan Presiden dan Menteri Koordinator.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.03	Penyusunan Rencana Anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.03.00	Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Perdagangan Naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Perdagangan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Standar Biaya Khusus (SBK).	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PR.03.01	Revisi Dokumen Anggaran Naskah yang berhubungan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA dan PO.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
5.	PR.04	Laporan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.04.00	Laporan Berkala Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (Laporan Triwulan, Laporan Tahunan) Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.04.01	Laporan Khusus Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, yang meliputi laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti Pidato Presiden, Rapat dengar pendapat dengan Dewan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.				
	PR.04.02	<i>Progress Report</i> Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.04.03	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan
	PR.04.04	Evaluasi kegiatan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Perencanaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
IX. KERUMAHTANGGAAN						
	RT.00	Fasilitas Kantor	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	RT.00.00	Kendaraan Dinas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, dan laporan kehilangan kendaraan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	RT.00.01	Ruang Rapat dan Konsumsi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	RT.00.02	Telekomunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	RT.00.03	Rumah Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rumah jabatan seperti perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan rumah jabatan dan pengamanannya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
2.	RT.01	Tata Ruang Naskah yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan ruangan baik ruang kerja maupun ruang publik.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
3.	RT.02	Pemeliharaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/ <i>service</i> kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
4.	RT.03	Pengamanan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/ <i>security</i> , buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Kementerian Perdagangan dan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir				
X. PENGAWASAN						
1.	PW.00	Audit Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal Biro Umum dan Layanan Pengadaan
2.	PW.01	Review Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan review atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
3.	PW.02	Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.				
	PW.03	Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
	PW.03.00	Internal Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari internal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
	PW.03.01	Eksternal Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
5.	PW.04	Pengawasan Melekat Naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
6.	PW.05	Laporan Hasil Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan semesteran dan tahunan, yang meliputi ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
7.	PW.06	Pemantauan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PW.06.00	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan/program dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi kegiatan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
	PW.06.01	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) meliputi Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, Keputusan tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, Keputusan penghapusan uang dan barang, dan laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR).	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PW.06.02	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atau Laporan Hasil Pemeriksaan lainnya yang ditindaklanjuti sampai dengan pelaporan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
	PW.06.03	Penerapan <i>Early Warning System</i> Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
	PW.06.04	Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan sampai dengan laporan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal
	PW.07	Kegiatan pengawasan lainnya Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Inspektorat Jenderal

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pengawasan, keikutsertaan dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya.				
XI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1.	DL.00	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.00.00	Perencanaan Kebutuhan Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi anggaran, peserta, waktu pelaksanaan, sistem dan metode, bahan ajar, kurikulum/silabus, tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.00.01	Sistem dan Metode Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	DL.00.02	Kurikulum/Silabus Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.00.03	Bahan Ajar/Modul Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan bahan ajar/modul pendidikan dan pelatihan perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.00.04	Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian konsultasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
2.	DL.01	Penyelenggaraan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.01.00	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan pelatihan terkait teknis bidang Perdagangan.				
	DL.01.01	Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait non teknis bidang Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.01.02	Teknis Pimpinan Lembaga/ Unit Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perdagangan bagi pimpinan lembaga perdagangan dan pimpinan unit perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.01.03	Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan Naskah yang berkaitan dengan evaluasi setelah pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
3.	DL.02	<i>Database</i> Tenaga Pengajar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan <i>database</i> tenaga pengajar perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
4.	DL.03	<i>Database</i> Alumni Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan <i>database</i> alumni pendidikan dan pelatihan perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
5.	DL.04	Perencanaan dan Persiapan Diklat Ekspor	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.04.00	Analisis Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.04.01	Pengembangan Kurikulum Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan bahan pelaksanaan pengembangan metodologi dan kurikulum.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
	DL.04.02	Promosi dan Publikasi Naskah-naskah yang nberkaitan dengan persiapan pelaksanaan promosi, publikasi, dan hubungan masyarakat.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	DL.04.03	Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa konsultasi, pendampingan dan monitoring, peningkatan kompetensi SDM Ekspor, peningkatan jejaring dan pembinaan alumni.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
6.	DL.05	Penyelenggaraan Diklat Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
7.	DL.06	Monitoring dan Evaluasi Diklat Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
8.	DL.07	<i>Database</i> tenaga Pengajar Diklat Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>database</i> tenaga pengajar	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
9.	DL.08	<i>Database</i> peserta pelatihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>database</i> Peserta pelatihan pendidikan dan pelatihan ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
XII. KEBIJAKAN PERDAGANGAN						
	BK.00	Analisis Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
	BK.00.00	Kebijakan Perdagangan Domestik. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi bidang stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, barang penting, logistik, distribusi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, tertib niaga, tertib mutu, tertib ukur, jasa perdagangan serta pembinaan usaha.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
	BK.00.01	Kebijakan Perdagangan Internasional. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa.				
	BK.00.02	Kebijakan Ekpor Impor dan Pengamanan Perdagangan. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengendalian impor serta perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
XIII. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN						
1.	PP.00	Pengkajian	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
	PP.00.00	Sistem Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang meliputi rapat persiapan, study refference, penyusunan instrumen	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.				
	PP.00.01	Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait kelembagaan perdagangan yang meliputi rapat persiapan, <i>study refference</i> , penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
	PP.00.02	Sumber Daya Manusia Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sumber daya manusia perdagangan baik yang berada di unit Pencipta Arsip maupun lembaga perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, <i>study refference</i> , penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose,	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penyusunan draft akhir, dan pencetakan.				
	PP.00.03	Sarana Prasarana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait sarana prasarana perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, <i>study refference</i> , penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan, <i>study refference</i> , penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
2.	PP.01	Pengembangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
	PP.01.00	Sistem Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sistem perdagangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Badan Kebijakan Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dinamis maupun statis yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, <i>study refference</i> , penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan <i>survey</i> , pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.			kinerja kementerian	
	PP.01.01	Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait kelembagaan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, <i>study refference</i> , penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan <i>survey</i> , pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
	PP.01.02	Sumber Daya Manusia Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian Sumber Daya Manusia Perdagangan yang berupa	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, <i>study refference</i> , penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan <i>survey</i> , pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.				
	PP.01.03	Sarana Prasarana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait sarana dan prasarana yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang meliputi rapat persiapan, <i>study refference</i> , penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan <i>survey</i> , pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
3,	PP.02	Diseminasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran hasil kajiandan NSPK yang telah disusun yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
4.	PP.03	Publikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan perdagangan melalui Jurnal/Bunga Rampai/ <i>Leaflet</i> /Warta yang meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, pengumuman penulisan, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, proses <i>review</i> , proses editing, pembuatan <i>dummy</i> , pencetakan, dan pendistribusian.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
5.	PP.04	Seminar/ <i>Call of Paper</i> /Bedah Naskah Naskah yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendukung pengelolaan publikasi jurnal/bunga rampai yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Badan Kebijakan Perdagangan
XIV. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
1.	TI.00	Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi teknologi informasi dan komunikasi serta data dan informasi, antara lain berupa	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		naskah persuratan, peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.				
2.	TI.01	Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.01.00	Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi <i>masterplan</i> dan <i>roadmap</i> teknologi informasi dan komunikasi serta indikator kinerja teknologi informasi dan komunikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		diseminasi rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.				
	TI.01.01	Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi (infrastruktur), antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.01.02	Perencanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi <i>risk assessment</i> dan rencana tindakan penanganan risiko, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan,	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.				
	TI.01.03	Perencanaan Manajemen Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi analisis <i>cost benefit</i> , evaluasi investasi dan risikonya, serta penentuan prioritas investasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.01.04	Perencanaan Manajemen Data dan Informasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen data dan informasi meliputi analisis kebutuhan data dan informasi, serta penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan data dan informasi,	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.				
2.	TI.02	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.02.00	Pengembangan Infrastruktur Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan infrastruktur, dan lain-lain.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.02.01	Pengembangan Aplikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		komunikasi yang terkait dengan pengembangan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan aplikasi, dan lain-lain.			dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
	TI.02.02	Pengembangan Basis Data Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan basis data, dan lain-lain.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.02.03	Pengembangan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan data dan informasi, dan lain-lain.			kinerja kementerian	
4.	TI.03	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.03.00	Pengelolaan Infrastruktur Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		diseminasi pengelolaan infrastruktur, dan lain-lain.				
	TI.03.01	Pengelolaan Aplikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan aplikasi, dan lain-lain.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.03.02	Pengelolaan Basis Data Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		diseminasi pengelolaan basis data, dan lain-lain.				
	TI.03.03	Pengelolaan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, bprosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan data dan informasi, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.03.04	Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi beserta <i>help desk</i> -nya seperti layanan <i>email</i> , <i>wifi</i> , <i>troubleshoot</i> , pembuatan <i>subdomain</i> ,	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klasisifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan penempatan <i>server</i> , antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.				
	TI.03.05	Layanan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan data dan informasi beserta <i>help desk</i> -nya, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF

No.	Kode Klasifikasi	Jenis arsip	Klaisfikasi Keamanan dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
I. BINA USAHA PERDAGANGAN						
	BU.00	Penyusunan Kebijakan di bidang Distribusi Barang	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.00.00	Distribusi Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan

		pelaporan terkait kebijakan di bidang distribusi barang secara langsung.				
	BU.00.01	Disribusi Tidak Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang distribusi barang secara tidak langsung.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.00.02	Waralaba Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang waralaba.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.00.03	Informasi Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang Informasi Perusahaan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan

2.	BU.01	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.01.00	Distribusi Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang distribusi langsung.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.01.01	Distribusi Tidak Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang distribusi tidak langsung.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.01.02	Waralaba Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang waralaba.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan

	BU.01.03	Informasi Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang informasi perusahaan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
3.	BU.02	Pemantauan dan Evaluasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.02.00	Pemantauan dan Evaluasi Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan sistem kinerja keuangan, program, dan anggaran oleh tim audit internal.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
	BU.02.01	Pemantauan dan Evaluasi Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan sistem kinerja keuangan, program, dan anggaran oleh tim audit eksternal.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Usaha Perdagangan
II. PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
1.	DN.00	Iklim Usaha	Terbatas	Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri

					kinerja kementerian	
	DN.00.01	Iklim Usaha Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan/pedoman bagi Usaha Kecil Menengah seperti pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) s/d konsep Rancangan Peraturan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.00.02	Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dalam bentuk konvensional seperti kemitraan dan partisipasi pameran, seperti kerja sama pameran dengan pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi pameran dan pameran Produk Unggulan Daerah serta kerja sama dengan toko/retail modern.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
2.	DN.01	Fasilitas Usaha dan Pemasaran	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.01.00	Fasilitas Usaha Produktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi usaha produktif, serta surat persetujuan pemberian bantuan sarana usaha perdagangan dalam bentuk barang seperti Perbaikan Warung, fasilitasi	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri

		halal, fasilitasi usaha produktif melalui proposal dinas, dan lain-lain.				
	DN.01.01	Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran Produk Unggulan Daerah melalui Pangan <i>Award</i>	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
3.	DN.02	Pengembangan Produk Lokal	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.02.00	Penelaah Potensi Produk Naskah-naskah yang berkaitan dengan identifikasi produk unggulan daerah seperti permohonan data ke dinas daerah s/d profil produk.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.02.01	<i>Database</i> UMKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan data UMKM binaan Kementerian Perdagangan dalam bentuk etalase produk Indonesia.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
4.	DN.03	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.03.00	Kerja sama Peningkatan Produk Dalam Negeri	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Direktorat Pemasaran

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Aku cinta Indonesia dengan sekolah dan pelaku usaha dan peningkatan produk dalam negeri kepada anak didik dan generasi muda/masyarakat dari surat pemberitahuan kegiatan s/d laporan kegiatan			mengganggu kinerja kementerian	Produk Dalam Negeri
	DN.03.01	Peningkatan Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kampanye Cinta Produk Indonesia yang mencakup antara lain: Identifikasi Produk Unggulan Berbasis Budaya, Hari Pakai Produk, Pemetaan Pola Konsumsi dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
III. SARANA PERDAGANGAN DAN LOGISTIK						
1.	SL.00	Sarana Perdagangan				
	SL.00.00	Pengembangan Sarana Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait kegiatan pengembangan sarana perdagangan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
	SL.00.01	Koordinasi Antar Instansi, Identifikasi/Justifikasi Teknis Usulan Sarana Perdagangan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Sarana

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Identifikasi/Justifikasi Teknis Usulan Pengembangan Sarana Perdagangan.			kinerja kementerian	Perdagangan dan Logistik
	SL.00.02	Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan, mulai dari perencanaan, penelaahan/reviu pengembangan sarana perdagangan, kunjungan kerja pimpinan dan peresmian sarana perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
2.	SL.01	Pembinaan Sarana Perdagangan				
	SL.01.00	Pasar Rakyat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pembinaan pelaku sarana perdagangan antara lain terkait Pasar Rakyat.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
	SL.01.01	Gudang, Pusat Distribusi dan Minuman Beralkohol Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik

		sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pembinaan pelaku sarana perdagangan antara lain terkait Gudang, Pusat Distribusi dan Minuman Beralkohol.			kinerja kementerian	
3.	SL.02	Kerja sama Logistik				
	SL.02.00	Kerja sama Logistik Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan kerja sama logistik pemerintah.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
	SL.02.01	Kerja sama Logistik Non Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan kerja sama logistik non pemerintah.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik

	SL.02.02	Pengembangan Informasi Logistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pengembangan informasi logistik.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
4.	SL.03	Perdagangan Antarpulau, Darat dan Perbatasan				
	SL.03.00	Antarpulau dan Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan atau pemantauan perdagangan antarpulau dan darat.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
	SL.03.01	Perbatasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan atau pemantauan perdagangan perbatasan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik

5.	SL.04	Pemantauan Sarana Perdagangan				
	SL.04.00	Pemerintah Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rapat koordinasi/bimbingan teknis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah guna terlaksananya Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Perdagangan sesuai dengan ketentuan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
	SL.04.01	Monitoring dan Evaluasi Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
IV. BINA PASAR DALAM NEGERI						
1.	BP.00	Barang Kebutuhan Pokok				
	BP.00.00	Hasil Pertanian dan Peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis; pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi beras, kedelai, jagung, susu, daging sapi, daging ayam, telur, cabai, dan bawang.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri

	BP.00.01	Hasil Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis; pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi gula, minyak goreng, terigu.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
	BP.00.02	Hasil Perikanan Kelautan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol dan ikan cakalang.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
	BP.00.03	Pelatihan Kontributor Pemantau Bapok di Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait pelatihan kontributor pemantau bapok di daerah	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri

	BP.00.04	Rancangan Kebijakan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Dalam Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/ sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait rancangan kebijakan distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang dalam pengawasan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
	BP.00.05	Diseminasi Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait diseminasi kebijakan barang kebutuhan pokok, barang penting	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
	BP.00.06	Koordinasi Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Dalam Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri

		diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait koordinasi pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang dalam pengawasan				
	BP.00.07	Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
2.	BP.01	Barang Penting				
	BP.01.00	Hasil Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi semen, besi beton, baja ringan, triplek, dan barang berbahaya (B2) dalam pengawasan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri

	BP.01.01	Penunjang Pertanian dan Pertambangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi pupuk non subsidi, pupuk bersubsidi dalam pengawasan, elpiji bersubsidi, dan benih pajale	Biasa/Terbuka	Fungsional Madya/Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
3.	BP.02	Informasi Pasar				
	BP.02.00	Informasi Harga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
	BP.02.01	Informasi Stok Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri

3.	BP.03	Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
	BP.03.00	Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok yang meliputi komoditi beras, kedelai, daging, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, terigu, dan ikan segar.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
	BP.03.01	Hewan dan Non Serelia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang penting meliputi benih pajale, pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi dan baja ringan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
V. PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA						
1.	EJ.00	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik				
	EJ.00.00	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data,	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa

		laporan terkait perdagangan melalui sistem elektronik.				
	EJ.00.01	Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa
	EJ.00.02	Data dan Informasi Perijinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemrosesan perizinan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait perdagangan melalui sistem elektronik.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa
2.	EJ.01	Perdagangan Jasa				
	EJ.01.00	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Jasa Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait Jasa Bisnis.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa

	EJ.01.01	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Jasa Non Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi, norma-norma, kebijakan, peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait Jasa non Bisnis.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa
	EJ.01.02	Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa

B. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI						
I. EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN						
1.	EP.00	Tanaman Pangan dan Holtikultura				
	EP.00.00	Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tanaman Pangan dan Holtikultura.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.00.01	Bimbingan Teknis/FGD dll Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain tentang Tanaman Pangan dan Holtikultura.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.00.02	<i>Database</i> Eksportir Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>database</i> eksportir Tanaman Pangan dan Holtikultura.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.00.03	Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru terkait Tanaman Pangan dan Holtikultura.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.00.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tanaman Pangan dan Holtikultura.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

2.	EP.01	Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan				
	EP.01.00	Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.01	Eksportir Terdaftar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian persetujuan eksportir terdaftar (ET) Sarang Burung Walet.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.02	Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Kulit.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.03	Bimbingan Teknis/FGD dll Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain tentang Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.04	<i>Database</i> Eksportir Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>database</i> eksportir Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

					kinerja kementerian	
	EP.01.05	Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru terkait Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.06	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
3.	EP.02	Perkebunan				
	EP.02.00	Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan permendag harga patokan ekspor (HPE) hasil perkebunan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.01	Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.02	Harga Referensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan harga referensi biji kakao dan CPO.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

	EP.02.03	Daftar Merek Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar merek <i>refined, bleached and deodorized</i> (RBD) <i>palm olein</i> .	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.04	Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru mengenai hasil perkebunan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.05	<i>Database</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>database</i> perkebunan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.06	Bimbingan Teknis/FGD/dan lain lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain mengenai perkebunan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.07	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
4.	EP.03	Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-rempah				

	EP.03.00	Persetujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.03.01	Bimbingan Teknis/FGD dll Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain berkaitan Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.03.02	<i>Database</i> Eksportir Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>database</i> eksportir berkaitan dengan Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.03.03	Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.03.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
5.	EP.04	Kehutanan				
	EP.04.00	Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE)	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) kehutanan.			kinerja kementerian	
	EP.04.01	Identifikasi Komoditi Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru kehutanan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.04.02	<i>Database</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>database</i> kehutanan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.04.03	Bimbingan Teknis/FGD/dan lain lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain kehutanan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.04.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kehutanan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
II. EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN						
1.	IP.00	Aneka Industri dan Jasa				
	IP.00.00	Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Direktorat Ekspor Produk

		perizinan ekspor produk aneka industri dan jasa.			mengganggu kinerja kementerian	Industri dan Pertambangan
	IP.00.01	Bimbingan Teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan produk aneka industri dan jasa.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.00.02	<i>Database</i> Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>database</i> eksportir berkaitan dengan produk aneka industri dan jasa.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.00.03	Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk aneka industri dan jasa	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.00.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk aneka industri dan jasa.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
2.	IP.01	Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika				
	IP.01.00	Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

					kinerja kementerian	
	IP.01.01	Bimbingan Teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.01.02	<i>Database</i> Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>database</i> eksportir berkaitan dengan produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.01.03	Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.01.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
3.	IP.02	Industri Agro dan Kimia				
	IP.02.00	Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk industri agro dan kimia.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

					kinerja kementerian	
	IP.02.01	Bimbingan Teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan produk industri agro dan kimia.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.02.02	<i>Database</i> Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>database</i> eksportir berkaitan dengan produksi industri agro dan kimia.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.02.03	Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk industri agro dan kimia.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.02.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk industri agro dan kimia.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
4.	IP.03	Pertambangan dan Batubara				
	IP.03.00	Perizinan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk pertambangan dan batubara.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

	IP.03.01	Bimbingan Teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan produk pertambangan dan batubara.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.03.02	<i>Database</i> Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>database</i> eksportir berkaitan dengan produk pertambangan dan batubara.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.03.03	Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk pertambangan dan batubara.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.03.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk pertambangan dan batubara.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.03.05	Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan kebijakan Permendag harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
5.	IP.04	Minyak Bumi dan Gas Bumi				
	IP.04.00	Perizinan Ekspor	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang	Direktorat Ekspor Produk

		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk minyak bumi dan gas bumi.			dapat mengganggu kinerja kementerian	Industri dan Pertambangan
	IP.04.01	Bimbingan Teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan produk minyak bumi dan gas bumi serta dukungan layanan perizinan ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.04.02	Database Eksportir Naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>database</i> eksportir berkaitan dengan produk minyak bumi dan gas bumi.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.04.03	Identifikasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk minyak bumi dan gas bumi.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
	IP.04.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk minyak bumi dan gas bumi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
III. IMPOR						
1.	IT.00	Barang Modal				
	IT.00.00	Perizinan Berusaha	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Direktorat Impor

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang modal			mengganggu kinerja kementerian	
	IT.00.01	Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang modal	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.00.02	Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang modal	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.00.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang modal	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.00.04	<i>Database</i> Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Database</i> Impor barang modal	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
2.	IT.01	Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				
	IT.01.00	Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor

	IT.01.01	Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.01.02	Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.01.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.01.04	<i>Database</i> Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Database</i> Impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
3.	IT.02	Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri				
	IT.02.00	Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.02.01	Surat Keterangan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang	Direktorat Impor

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang aneka industri dan bahan baku industri			dapat mengganggu kinerja kementerian	
	IT.02.02	Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.02.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang aneka industri dan bahan baku industri	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.02.04	<i>Database</i> Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Database</i> Impor barang aneka industri dan bahan baku industri	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
4.	IT.03	Barang Konsumsi				
	IT.03.00	Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang konsumsi	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.03.01	Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang konsumsi	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor

	IT.03.02	Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang konsumsi	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.03.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang konsumsi	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.03.04	<i>Database</i> Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Database</i> Impor barang konsumsi	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
5.	IT.04	Barang Kimia, Tambang dan Limbah				
	IT.04.00	Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang kimia, tambang dan limbah	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.04.01	Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang kimia, tambang dan limbah	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.04.02	Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Impor

		bidang impor barang kimia, tambang dan limbah			kinerja kementerian	
	IT.04.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang kimia, tambang dan limbah	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.04.04	<i>Database</i> Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Database</i> Impor barang kimia, tambang dan limbah	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
6.	IT.05	Barang Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				
	IT.05.00	Perizinan Berusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.05.01	Surat Keterangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.05.02	Sosialisasi/FGD/Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor

	IT.05.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang kehutanan, kelautan dan perikanan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
	IT.05.04	<i>Database</i> Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Database</i> Impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
7.	IT.06	Kebijakan Impor Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan tanggapan, penjelasan dan penyampaian data di bidang impor	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Impor
IV. FASILITAS EKSPOR DAN IMPOR						
1.	EI.00	Ketentuan Asal Barang dan Dokumen Keterangan Asal				
	EI.00.00	Skema dan Prosedur Ketentuan Asal Barang Naskah yang berkaitan dengan konsep skema ketentuan asal barang dalam rangka koordinasi perundingan perdagangan dengan negara mitra, penyusunan rumusan konsep kebijakan ketentuan asal barang, sebagai implementasi kesepakatan perundingan perdagangan dengan negara mitra, rancangan keputusan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor

		penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan pejabat IPSKA, serta pelaksanaan publikasi, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan ketentuan asal barang.				
	EI.00.01	Dokumen Keterangan Asal Naskah yang berkaitan dengan proses bisnis, sistem pelayanan, penanganan kendala, konsultasi, asistensi dan <i>workshop</i> dalam rangka implementasi dan monitoring Dokumen Keterangan Asal yaitu Surat Keterangan Asal (SKA), Dokumen Asal Barang (DAB), monitoring Eksportir Tersertifikasi (ES) dan Eksportir Teregistrasi (ER).	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.00.02	Eksportir Tersertifikasi (ES) Naskah yang berkaitan dengan <i>output</i> penetapan sebagai Eksportir Tersertifikasi (ES).	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.00.03	<i>Retroactive Check</i> dan <i>Rejection</i> SKA Naskah yang berkaitan dengan penanganan permintaan <i>retroactive check</i> dan <i>rejection</i> SKA dari negara mitra.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.00.04	Data dan Informasi Dokumen Keterangan Asal Naskah yang berkaitan dengan permintaan data dari pemangku kepentingan mengenai eksportir dan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

		komoditi dalam Dokumen Keterangan Asal.			kinerja kementerian	
2.	EI.01	Fasilitasi Akses Pasar				
	EI.01.00	Informasi Akses Pasar Naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan penyebaran informasi akses pasar ekspor kepada pelaku usaha dan instansi terkait.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.01.01	Optimalisasi Akses Pasar Tujuan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan koordinasi untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memanfaatkan akses pasar ekspor, penanganan kendala atau hambatan di negara tujuan ekspor, analisa, pemetaan dan strategi optimalisasi akses pasar ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
3.	EI.02	Fasilitasi Perdagangan dan Kerja sama Ekspor dan Impor				
	EI.02.00	Fasilitasi Perdagangan dalam Lingkup WTO Naskah yang berkaitan dengan program kerja Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP), isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO TFA dan <i>Home Contact Point</i> atas permasalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha atau instansi terkait	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

	EI.02.01	Fasilitasi Perdagangan dalam Lingkup Kerja sama Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam ASEAN-TF, isu Fasilitasi Perdagangan di Forum Bilateral, Regional, serta Multilateral/Organisasi Internasional lainnya dan <i>Home Contact Point</i> atas permasalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha atau instansi terkait	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.02.02	Fasilitasi <i>Tariff Rate Quote</i> (TRQ) Naskah berkaitan dengan implementasi fasilitasi <i>Tariff Rate Quote</i> (TRQ) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.02.03	Fasilitasi Kerja sama Ekspor dan Impor Naskah berkaitan dengan implementasi fasilitasi kerja sama dan bantuan negara/lembaga pemberi donor terkait dengan fasilitasi ekspor dan impor	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
4.	EI.03	Pelayanan Ekspor dan Impor				
	EI.03.00	Fasilitasi Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor Naskah yang berkaitan dengan konsep kebijakan, sistem layanan dan proses bisnis, publikasi, sosialisasi, bimbingan teknis, data dan informasi, analisis, monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

		kebijakan dan sistem pelayanan ekspor dan impor				
	EI.03.01	Fasilitasi Implementasi dan Integrasi Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor Naskah yang berkaitan dengan integrasi sistem layanan dan digitalisasi perizinan ekspor dan impor, penanganan kendala, konsultasi dan asistensi implmentasi sistem pelayanan ekspor dan impor	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.03.02	Eksportir dan Importir Bereputasi Baik Naskah yang berkaitan dengan eksportir dan importir bereputasi baik.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
5.	EI.04	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan				
	EI.04.00	Kawasan Perdagangan Khusus Naskah yang berkaitan dengan rumusan konsep kebijakan, masukan, analisis, penanganan isu, monitoring dan evaluasi kebijakan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Perbatasan, dan kawasan perdagangan khusus lainnya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.04.01	Transportasi dan Kepelabuhanan Naskah yang berkaitan dengan rumusan konsep kebijakan, masukan, analisis, penanganan isu, monitoring dan evaluasi kebijakan fasilitasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

		kelancaran arus barang dan logistik dalam kegiatan ekspor dan impor.				
6.	EI.05	Fasilitasi Cara Perdagangan dan Sistem Pembayaran				
	EI.05.00	Kebijakan dan Skema Imbal Dagang Naskah yang berkaitan dengan pemetaan potensi produk, analisa data dalam rangka skema imbal dagang dan rumusan konsep kebijakan skema imbal dagang	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.05.01	Penjajakan dan Implementasi Skema Imbal Dagang Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penjajakan, implementasi skema imbal dagang dengan negara mitra dan penanganan isu atau kendala dalam pelaksanaan skema imbal dagang, monitoring dan evaluasi proses penjajakan dan implementasi imbal dagang	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.05.02	Kebijakan Fasilitasi Sistem Pembayaran Naskah yang berkaitan dengan pemetaan potensi produk, analisa data dalam rangka rumusan konsep kebijakan sistem pembayaran dan evaluasi atas implementasi kebijakan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.05.03	Fasilitasi Sistem Pembayaran Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam pemanfaatan sistem pembayaran	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

		ekspor dan impor dan penanganan isu bersama dengan instansi terkait			kinerja kementerian	
7.	EI.06	Fasilitasi Sistem Pembiayaan				
	EI.06.00	Kebijakan Fasilitasi Pembiayaan Naskah yang berkaitan dengan pemetaan, analisa data produk dan pelaku usaha, analisis skema pembiayaan ekspor dalam rangka rumusan konsep kebijakan sistem pembiayaan dan rekomendasi skema pembiayaan ekspor	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
	EI.06.01	Implementasi Fasilitasi Pembiayaan Naskah yang berkaitan dengan diseminasi, bimbingan teknis, asistensi kurasi pelaku usaha, dan usulan pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitasi akses pembiayaan ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
V. PENGAMANAN PERDAGANGAN						
1.	PD.00	Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan hambatan teknis perdagangan yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi/laporan pelaku usaha dari perwakilan indonesia/kebijakan dari otoritas negara tujuan ekspor, konsultasi/pertemuan untuk penanganan di negara mitra dagang, fasilitasi penyelesaian sengketa, FGD,	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengamanan Perdagangan

		Monev, pencatatan riwayat penanganan kasus di profil kasus				
	PD.01	Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan dumping, subsidi, <i>safeguard</i> yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi dari negara penuduh, dokumen petisi, surat <i>interested parties</i> , dokumen kuesioner, advokasi/pendampingan teknis penanganan hambatan perdagangan, penyusunan submisi/tanggapan pemerintah, dengar pendapat, pendampingan saat <i>on the spot investigation</i> , verifikasi kasus tuduhan subsidi, dokumen <i>provisional measures disclosure</i> , dokumen <i>final determinaton</i> , penyampaian hasil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengamanan Perdagangan
	PD.02	Pengajuan <i>Dispute Settlement Body</i> (DSB) WTO Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengajuan DSB WTO terhadap penanganan tuduhan dumping, surat dan draft permintaan <i>legal opinion</i> ke ACWL, permintaan konsultasi, surat dirjen terkait permintaan pengajuan <i>dispute</i> , surat notifikasi dari indonesia ke WTO, pembentukan panel (<i>establishment, composition</i>), <i>first written submission, first meeting on the panel, second written submission</i> ,	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengamanan Perdagangan

		<i>second meeting panel, panel report issued to the parties</i>				
	PD.03	<i>Database</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>database</i> penanganan perdagangan meliputi profil kasus, dokumen terkait (petisi, submisi, <i>preliminary measures, final determination, legal drafting</i> , profil perusahaan, profil negara).	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengamanan Perdagangan
	PD.04	Bimbingan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimtek hambatan perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengamanan Perdagangan

C. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA						
I. STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU						
1.	SM.00	Perumusan Standar dan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan standar dan kebijakan standardisasi di bidang Perdagangan yang sesuai dengan peraturan Perdagangan dan Peraturan lainnya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
2.	SM.01	Penerapan Standar dan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan standar dan kebijakan di bidang Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
3.	SM.02	Verifikasi Mutu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan Nomor Pendaftaran Barang (NPB), pendaftaran barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pendaftaran Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR dan verifikasi mutu produk sesuai dengan ketentuan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
4.	SM.03	Kelembagaan Standardisasi Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan

		standardisasi nasional, sistem mutu, dan survei kepuasan pelanggan				Pengendalian Mutu
5.	SM.04	Kelembagaan Standardisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan standardisasi internasional.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
6.	SM.05	Sarana dan Informasi Mutu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar acuan mutu produk, komoditi sesuai dengan ketentuan, informasi standar mitra tujuan ekspor, promosi dan publikasi standardisasi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
7.	SM.06	Pengujian Mutu Barang				
	SM.06.00	Pelayanan Jasa Pengujian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa pengujian.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.06.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Pengujian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa pengujian.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
8.	SM.07	Kalibrasi				
	SM.07.00	Pelayanan Jasa Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang	Direktoraat Standarisasi dan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa kalibrasi			mengganggu kinerja kementerian	Pengendalian Mutu
	SM.07.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Kalibrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa kalibrasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.08	Sertifikasi				
	SM.08.00	Pelayanan Jasa Sertifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sertifikasi produk, pelayanan sertifikasi person dan pemeriksa halal.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.08.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Sertifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa sertifikasi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
II. METROLOGI						
1.	MR.00	Sarana dan Kerja sama				
	MR.00.00	Sarana Metrologi Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek kepada Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) dan Dinas, Cap Tanda Tera (CTT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan laporan kemetrolagian dari UPTD dan Dinas.	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi

	MR.00.01	Kerja sama Metrologi Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama baik dalam dan luar negeri di bidang Kemetrologian antara lain nota kesepahaman/MoU Kerja sama, partisipasi sidang luar negeri, <i>workshop</i> kemetrologian negara anggota <i>Asia pasific Legal Metrology Forum</i> , dan lain-lain.	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.00.02	Peraturan Perundangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan perundangan di bidang Metrologi Legal	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
2.	MR.01	Kelembagaan dan Penilaian				
	MR.01.00	Kelembagaan Metrologi Legal Naskah-naskah yang terkait dengan dokumen mengenai pendirian UPTD, serta monitoring dan evaluasi	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.01.01	Penilaian Metrologi Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>surveillance</i> , bimtek,	Biasa/Terbuka	Wakil Ketua Tim/Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Metrologi

		penilaian UPTD, dan penilaian ulang UPTD.				
3.	MR.02	Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Standar Ukuran				
	MR.02.00	Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu Naskah yang berkaitan dengan dokumen besaran massa, listrik, tekanan dan suhu.	Terbatas	Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.02.01	Besaran Arus, Panjang, dan Volume Naskah yang berkaitan dengan dokumen besaran arus, panjang dan volume	Terbatas	Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.02.02	SKPKPT (Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe) Naskah yang berkaitan dengan dokumen surat keterangan pembebasan persetujuan tipe	Terbatas	Ketua Tim/Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.02.03	SKVI (Surat Keterangan Verifikasi Internal)	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Metrologi

		Naskah yang berkaitan dengan dokumen surat keterangan verifikasi internal.			Kementerian Perdagangan	
4.	MR.03	Pembinaan, Komunikasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (PKP3M)				
	MR.03.00	Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (UTTP) Naskah yang berkaitan dengan: - Pengawasan UTTP dan Satuan Ukuran - Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan - Penyusunan NSPK - Evaluasi - Penelaahan kasus untuk pengawasan UTTP	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.03.01	Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Naskah yang berkaitan dengan: - Pengawasan BDKT dan Satuan Ukuran - Peredaran BDKT - Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan - Penyusunan NSPK - Evaluasi - Penelaahan kasus untuk Pengawasan BDKT dan lain-lain - Sertifikasi BDKT	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi

	MR.03.02	Satuan Ukuran Naskah yang berkaitan dengan: Pengawasan satuan ukuran Penelaahan kasus untuk penelaahan satuan ukuran	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.03.03	Komunikasi Publik Naskah yang berkaitan dengan : - Penyuluhan - Forum pengawasan kemetrologian - Bimbingan teknis - Supervisi - Workshop/seminar dibidang metrologi legal - Pemahaman penyebaran informasi melalui media cetak media elektronik, media sosial dan lainnya - Sosialisasi Metrologi Legal.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Metrologi
	MR.03.04	Pengaduan Masyarakat Naskah yang berkaitan dengan : - Adanya laporan dari masyarakat tentang permasalahan kemetrologian - Penelahaan temuan /kasus berdasarkan laporan dari Masyarakat	Terbatas	Ketua Tim	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi

		- Penanganan pengaduan masyarakat tentang Metrologi Legal				
	MR.03.05	Penegakan Hukum Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyidikan Metrologi Legal	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi,keuntungan, kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Metrologi
5.	MR.04	Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML)				
	MR.04.00	Bimbingan Mutu Naskah yang berkaitan dengan dokumen sistem mutu, rekaman sistem mutu, Rekaman pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Massa dan Panjang, sertifikat kalibrasi standar, Pengembangan mutu laboratorium, pengembangan metode dan fasilitas laboratorium, peraturan standar internasional/standar nasional, laporan kegiatan, dan sertifikat akreditasi.	Terbatas	Fungsional Muda/Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.04.01	Pelayanan Teknis Naskah yang berkaitan dengan rekaman teknis kalibrasi dan verifikasi, serta rekaman teknis yang didigitalisasi.	Terbatas	Fungsional Muda/Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Metrologi

					Kementerian Perdagangan	
6.	MR.05	Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan (BP UTTP)				
	MR.05.00	Bimbingan Mutu Naskah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pengembangan mutu laboratorium, pengembangan metode laboratorium, pengembangan metode pengukuran, pengujian UTTP, untuk mendapatkan akreditasi dan sertifikasi dari Badan Akreditasi: komite akreditasi nasional	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.05.01	Pelayanan Teknis Naskah yang berkaitan dengan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe, dan izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP penanganan khusus didalam maupun diluar kantor.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan, kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	MR.05.01
7.	MR.06	Standardisasi Metrologi Legal				
	MR.06.00	Bimbingan Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan metrologi legal, dan pendataan potensi UTTP, sosialisasi metrologi bagi kabupaten/kota,	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Direktorat Metrologi

		fasilitasi pegawai berhak, fasilitasi pengamat tera, <i>upgrading</i> ilmu kemetrologian, fasilitasi daerah tertib ukur/pasar tertib ukur, monitoring penyelenggaraan dan pengelolaan laboratorium dan bimbingan teknis kemetrologian.			Kementerian Perdagangan	
	MR.06.01	Pelayanan Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi tera dan/tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP, verifikasi standar satuan ukuran, uji banding lab metrologi pemerintah daerah, peningkatan/evaluasi manajemen mutu laboratorium, serta dukungan tugas pokok dan fungsi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Metrologi
III. TERTIB NIAGA						
1.	TN.00	Pengawasan Pameran Dagang, Perdagangan Antar Pulau dan Perdagangan Lainnya serta Publikasi Kegiatan Perdagangan				
	TN.00.00	Pengawasan Pameran Dagang dan Publikasi Kegiatan Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga

		pameran dagang dan publikasi kegiatan perdagangan.				
	TN.00.01	Pengawasan Perdagangan Antar Pulau dan Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan antar pulau dan perdagangan lainnya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga
2.	TN.01	Analisa Kasus Perdagangan dan Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)				
	TN.01.00	Analisa Kasus Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kasus perdagangan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga
	TN.01.01	Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga

		Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan).				
	TN.02	Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik				
	TN.02.00	Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perizinan kegiatan perdagangan dalam negeri	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga
	TN.02.01	Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga

		dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik				
4.	TN.03	Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur				
	TN.03.00	Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang Pokok dan Penting Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan distribusi barang pokok dan penting	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga
	TN.03.01	Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang yang Diatur Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan distribusi barang yang diatur.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga
5.	TN.04	Pengawasan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor) dan Post Border				

	TN.04.00	Pengawasan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor) Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor).	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga
	TN.04.01	Pengawasan Kegiatan Post Border Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan post border.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Tertib Niaga
IV. PEMBERDAYAAN KONSUMEN						
1.	PK.00	Analisa Perlindungan Konsumen				
	PK.00.00	Penyusunan Regulasi Perlindungan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan, Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, Rancangan Keputusan Direktur	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen

		Jenderal, serta Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK).				
	PK.00.01	Evaluasi Regulasi Perlindungan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil monitoring implementasi regulasi perlindungan konsumen, hasil evaluasi pelaksanaan regulasi perlindungan konsumen, dan <i>Regulatory Impact Assesment</i> (RIA)	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
2.	PK.01	Pelayanan Pengaduan Konsumen				
	PK.01.00	Konsultasi Pengaduan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan Konsultasi dalam rangka perlindungan konsumen.	Tertutup	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
	PK.01.01	Penanganan Pengaduan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Pengaduan Konsumen, tindak lanjut melalui Fasilitasi Pengaduan Konsumen dan lain sebagainya	Tertutup	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
	PK.02	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha				
	PK.02.00	Bimbingan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan edukasi perlindungan konsumen, penyuluhan perlindungan konsumen, fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat, pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen

	PK.02.01	Bimbingan Pelaku Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan perlindungan konsumen kepada pelaku usaha melalui sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
	PK.02.02	Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Publikasi perlindungan konsumen melalui berbagai media baik offline maupun online.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
4.	PK.03	Fasilitasi Kelembagaan				
	PK.03.00	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, Bimbingan Teknis, Konsultasi Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), dan operasional Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) secara umum.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
	PK.03.01	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, Pembentukan, Pengangkatan anggota, Pengangkatan anggota Sekretariat, Bimbingan Teknis, Penerbitan Surat	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pemberdayaan Konsumen

1.	BJ.00	Produk Logam, Mesin dan Elektronika				
	BJ.00.00	Produk Logam dan Mesin Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk logam dan mesin, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
	BJ.00.01	Produk Elektronika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk elektronika, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
	BJ.01	Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka				
	BJ.01.00	Produk Hasil Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

		daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil pertanian, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.				
	BJ.01.01	Produk Hasil Kimia dan Aneka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil kimia dan aneka, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3.	BJ.02	Jasa dan Fasilitas Kegiatan Pengawasan				
	BJ.02.00	Produk Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

		rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa distribusi, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.				
	BJ.02.01	Fasilitasi Kegiatan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa bisnis, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
4.	BJ.03	Manajemen Tata Kelola, Evaluasi Kegiatan Pengawasan dan NSPK di Bidang Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan manajemen tata kelola, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi tindak lanjut kegiatan pengawasan, NSPK dan kriteria bidang pengawasan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

5.	BJ.04	Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional				
	BJ.04.00	Analisa Kasus Perlindungan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat apresiasi atau surat teguran, kerangka analisa kasus hasil pengawasan, dan rekomendasi pelimpahan kasus.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
	BJ.04.01	Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, bimtek terhadap PPBJ dan PPNS-PK.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
6.	BJ.05	Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen				
	BJ.05.00	Penegakan hukum pengawasan produk logam, mesin dan elektronika dan jasa distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengumpulan bahan keterangan, berkas perkara, laporan kemajuan kegiatan penyidikan, anatomi kasus, hingga rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

	BJ.05.01	Penegakan Hukum Pengawasan Produk Hasil Pertanian kimia dan Aneka dan Jasa Bisnis Semula Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan satgas dalam rangka pengawasan terpadu, mulai dari SK pembentukan satgas sampai dengan laporan. (SDA) Menjadi Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengumpulan bahan keterangan, berkas perkara, laporan kemajuan kegiatan penyidikan, anatomi kasus, hingga rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
--	----------	--	----------	-----------------------------------	---	---

D. BIDANG PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL						
I. PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA						
1.	PO.00	Perundingan dan Bahan-Bahan Terkait Dukungan Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan paska perundingan, serta bahan-bahan terkait dukungan Pimpinan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
2.	PO.01	Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
3.	PO.02	Non-Pertanian dan Perdagangan Digital Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Non-Pertanian dan Perdagangan Digital	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
4.	PO.03	Instrumen Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Instrumen Pengamanan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
5.	PO.04	Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO Naskah-naskah yang	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang	Direktorat Perundingan

1.	PA.00	Fasilitasi Perdagangan Barang ASEAN (Akses Pasar dan Kepabeanan)				
	PA.00.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
	PA.00.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
	PA.00.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
	PA.00.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
2.	PA.01	Investasi Usaha Kecil dan Menengah dan daya saing isu-isu ASEAN				
	PA.01.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang terkait Investasi, Usaha Kecil, dan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Perundingan ASEAN

		Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.			kinerja kementerian	
	PA.01.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait investasi, usaha kecil, dan menengah, daya saing dan isu-isu ASEAN.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.01.02	Laporan Hasil Sidang Perundingan (revisi Dir. ASEAN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan laporan hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.01.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
3.	PA.02	ASEAN Mitra Dialog				
	PA.02.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.02.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Direktorat Perundingan ASEAN

		Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang.			mengganggu kinerja kementerian	
	PA.02.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain).	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.02.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan mitra dialog.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
4.	PA.03	Kerja sama Antar dan Sub Regional				
	PA.03.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding dan juga materi sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.03.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan, dan laporan hasil perundingan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN

	PA.03.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.03.03	Tindaklanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
5.	PA.04	Proses Ratifikasi <i>Agreement</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses ratifikasi <i>agreement</i> .	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
6.	PA.05	Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN
III. ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL						
1.	AO.00	Akses Perdagangan dan Akses Investasi Perundingan APEC				
	AO.00.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang	Direktorat Perundingan

		rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.			dapat mengganggu kinerja kementerian	Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.00.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.00.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.00.03	Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
2.	AO.01	Fasilitasi Perdagangan dan Fasilitasi Perundingan APEC				
	AO.01.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

					kinerja kementerian	
	AO.01.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.01.02	Laporan Hasil Perundingann Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.01.03	Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
3.	AO.02	ITRC				
	AO.02.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

	AO.02.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.02.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
4.	AO.03	IRCo				
	AO.03.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.03.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.03.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

					kinerja kementerian	
5.	AO.04	ANRPC				
	AO.04.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.04.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.04.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
6.	AO.05	APCC				
	AO.05.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

	AO.05.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.05.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
7.	AO.06	ISO				
	AO.06.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.06.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.06.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Perundingan Antar Kawasan

					kinerja kementerian	dan Organisasi Internasional
8.	AO.07	ICO				
	AO.07.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.07.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.07.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
9.	AO.08	ICCO				
	AO.08.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

	AO.08.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.08.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
10.	AO.09	IPC				
	AO.09.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.09.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.09.02	Data Komoditi Internasional Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Perundingan Antar Kawasan

					kinerja kementerian	dan Organisasi Internasional
11.	AO.10	Organisasi Kerja sama Islam				
	AO.10.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.10.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.10.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.10.03	Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
12.	AO.11	Developing-8				
	AO.11.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang	Direktorat Perundingan

		rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.			dapat mengganggu kinerja kementerian	Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.11.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.11.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.11.03	Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
13.	AO.12	G-20				
	AO.12.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

	AO.12.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.12.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
	AO.12.03	Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
14.	AO.13	Diseminasi Hasil Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
IV. PERUNDINGAN BILATERAL						
1.	PB.00	Pra Perundingan				

	PB.00.00	Persiapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan perundingan seperti kertas posisi, agenda, dan lain-lain.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Perundingan Bilateral
	PB.00.01	Draft Perjanjian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan draft perjanjian sampai draft tersebut tersusun.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Perundingan Bilateral
2.	PB.01	Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan perundingan meliputi <i>trade agreement</i> , <i>MoU</i> , <i>Joint Statement</i> , <i>Agreed Minutes</i> , dan <i>Prefential Trade Agreement</i> . FTA, CEPA, ECA, BTMF, Sub. Mission on GSP dan sebagainya.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Perundingan Bilateral
3,	PB.02	Pasca Perundingan				
	PB.02.00	Konsultasi Publik di Pusat dan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses dan laporan kegiatan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktoraat Perundingan Bilateral
	PB.02.01	Proses Ratifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan naskah penjelasan, rancangan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Direktoraat Perundingan Bilateral

		peraturan presiden, terjemahan serta naskah perjanjian.			mengganggu kinerja kementerian	
V. PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK						
1.	PJ.00	Jenis Perundingan Jasa (Jasa Bisnis, Jasa distribusi, dan keuangan, Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, Jasa pendidikan dan kesehatan, Jasa komunikasi, lingkungan, dan energi, Jasa transportasi dan logistik.				Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
	PJ.00.00	Persiapan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia – Australia, Indonesia – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, Indonesia - Taiwan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
	PJ.00.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia –	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

		Australia, Indonesia – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, Indonesia - Taiwan.				
	PJ.00.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia – Australia, Indonesia – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, Indonesia – Taiwan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
	PJ.00.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia – Australia, Indonesia – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, Indonesia - Taiwan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
2.	PJ.01	<i>Rules</i> , peraturan <i>domestic</i> dan penyusunan analisis informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi terkait, jasa bisnis, jasa distribusi, jasa keuangan, jasa konstruksi, jasa pariwisata, jasa rekreasi budaya dan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

		olahraga, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa lingkungan, jasa energi, jasa transportasi, jasa logistik, jasa <i>e-commerce</i> .				
3.	PJ.02	Konsultasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi publik seperti <i>Workshop, Focus Group Discussion, Dialog Series</i> , dan lain-lain terkait workshop, <i>Focus Group Discussion, Dialogue series</i> , konsultasi Publik, rapat koordinasi.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

E. BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL						
I. PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR						
1.	IE.00	Pengembangan Pasar Ekspor				
	IE.00.00	Analisa Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Market Intelligent</i> , survei data dan lapangan, <i>Market Brief</i> penyedia informasi ringkas pasar tujuan ekspor, laporan hasil kegiatan, serta peta pasar tujuan ekspor.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
	IE.00.01	Penyebarluasan Informasi dan Peluang Pasar Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan laporan hasil penyebarluasan informasi dan peluang pasar ekspor	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
	IE.01	Pengembangan Sistem Informasi Ekspor				
	IE.01.00	Pengelolaan Data Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemutakhiran data serta neraca perdagangan dan analisis informasi ekspor.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
	IE.01.01	Sistem Informasi Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, situs website, termasuk implementasi aplikasi online, bimbingan teknis, <i>membership</i> sistem dan promosi online, data	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

		member serta pengelolaan jaringan informasi.				
	IE.02	Pelayanan Informasi Ekspor				
	IE.02.00	Pelayanan Pelaku Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>customer service center</i> data pelaku usaha, <i>Gathering, permanent trade display, inquiry</i> , dan juga pemberian penghargaan primaniyarta dan primaduta.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
	IE.02.01	Publikasi Informasi Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan publikasi informasi ekspor berupa <i>leaflet</i> , brosur, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
	II. KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKSPOR					
1.	KE.00	Luar Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)				
	KE.00.00	MoU/Perjanjian Kerja sama Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian pengembangan ekspor hingga pelaporan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor
	KE.00.01	Aktivasi/diseminasi Implementasi Hasil Kerja sama Pengembangan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi pengembangan ekspor hingga pelaporan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor

	KE.00.02	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor
2.	KE.01	Dalam Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)				
	KE.01.00	Identifikasi Kerja sama Pengembangan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor
	KE.01.01	Mou/Perjanjian Kerja sama Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian kerja sama dalam negeri hingga pelaporan	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor
	KE.01.02	Aktivasi/Diseminasi Implementasi Hasil Kerja sama Pengembangan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi implementasi hasil kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor
	KE.01.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor
	III. PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR					

1.	PE.00	Produk Primer (pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, agro dan produk lainnya yang masuk kategori produk Primer)				Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.00.00	Identifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi produk, eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan kegiatan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.00.01	Pengembangan Produk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, <i>rebranding</i> , pembuatan laporan dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.00.02	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.00.03	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi <i>designer dispatch services</i> (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor

		award dan kegiatan lain terkait dengan pengembangan produk.				
2.	PE.01	Produk Manufaktur (makanan & minuman, kayu, kimia, logam dan produk lain yang masuk kategori produk manufaktur)				Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.01.00	Identifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi produk, eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan kegiatan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.01.01	Pengembangan Produk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, <i>rebranding</i> , pembuatan laporan dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.01.02	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.01.03	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi <i>designer dispatch services</i> (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor

		desain, workshop desain, desain award dan kegiatan lain terkait dengan pengembangan produk.				
3.	PE.02	Produk Jasa				
	PE.02.00	Identifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.02.01	Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, <i>rebranding</i> .	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.02.02	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.02.03	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi <i>designer dispatch services</i> (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor

4.	PE.03	Produk Kreatif (media dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan desain serta Produk lainnya yang termasuk kategori produk kreatif).				Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.03.00	Identifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.03.01	Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, <i>rebranding</i> .	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.03.02	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.03.03	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi <i>designer dispatch services</i> (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, <i>workshop</i> desain, desain award.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	IV. PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA					

1.	PC.00	Promosi Dagang (Dalam Negeri dan Luar Negeri)				
	PC.00.00	Partisipasi Pameran Dagang Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi pameran dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil pameran.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra
	PC.00.01	Partisipasi Misi Dagang Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil misi dagang.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra
	PC.00.02	Partisipasi Misi Pembelian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi pembelian mulai dari koordinasi perwakilan luar negeri sampai pembuatan laporan hasil misi pembelian	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra
	PC.00.03	Sosialisasi Promosi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi promosi mulai dari survei ke calon peserta sampai pembuatan laporan hasil sosialisasi promosi.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra
2.	PC.01	Pencitraan				
	PC.01.00	Perencanaan Naskah yang berkaitan dengan pembuatan <i>video nation branding</i> , <i>Focus Group Discussion</i> , pembuatan video peningkatan citra	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra

		produk indonesia, serta laporan hasil kegiatan.			kinerja kementerian	
	PC.01.01	Penerapan Citra Naskah yang berkaitan dengan penerapan citra, yaitu pembuatan <i>video nation branding</i> , kegiatan terkait aktivitas ekspor, pembuatan kit promosi serta laporan hasil kegiatan dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra
	PC.01.02	Pemantauan dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kuesioner pemantauan dan evaluasi, serta laporan hasil kegiatan.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra

F. BIDANG PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI						
I.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI					
	UD.00	Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)				
	UD.00.00	Rancangan Undang-undang Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perundang-undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
	UD.00.01	Rancangan Peraturan Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perundang-undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
	UD.00.02	Rancangan Peraturan Presiden Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Biro Perundang-undangan

		Presiden mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.			mengganggu kinerja kementerian	Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
	UD.00.03	Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan mulai dari rancangan awal sampai ditetapkan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perundang-undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
	UD.00.04	Peraturan/Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/ Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Perundang-undangan Perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
2.	UD.01	Pelayanan Hukum				

	UD.01.00	Penegakan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan, kegiatan penyidik PPNS, Berkas administrasi serta penyegaran PPNS.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pengawasan dan Penindakan
	UD.01.01	Pemberian Pelayanan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi hukum serta asistensi hukum terhadap pengaduan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pengawasan dan Penindakan
	UD.01.02	Penanganan Perkara Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan/gugatan/Laporan kepolisian, pra peradilan, perdata, tata usaha negara, arbitrase.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pengawasan dan Penindakan
3.	UD.02	Penindakan Pelanggaran	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pengawasan dan Penindakan
	UD.02.00	Pelanggaran Ilegal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ilegal.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Pengawasan dan Penindakan

					kinerja kementerian	
	UD.02.01	Pelanggaran Legal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Legal.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pengawasan dan Penindakan
II. PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS						
1.	PF. 00	Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan monitoring pengawasan transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik.				
	PF.00.00	Pengawasan Transaksi PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pelaku usaha PBK.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
	PF.00.01	Pengawasan Transaksi Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pasar fisik.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	

2.	PF.01	Pengawasan Kepatuhan Kegiatan dan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan koordinasi pengawasan kepatuhan kegiatan dan keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
	PF.01.00	Pengawasan Kepatuhan PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha PBK.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
	PF.01.01	Pengawasan Kepatuhan Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha Pasar Fisik.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
3.	PF.02	Audit Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan, dan monitoring audit terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Pasar Fisik, serta Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).				

	PF.02.00	Pengawasan Audit PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit pelaku usaha PBK.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
	PF.02.01	Pengawasan Audit Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit pelaku usaha Pasar Fisik.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
	PF.02.02	Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik.				
4.	PF.03	Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan koordinasi pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
	PF.03.00	Pengawasan Sistem Resi Gudang Naskah yang berkaitan dengan pengawasan terhadap gudang dan pengelola gudang, pengawasan terhadap bank penyalur pembiayaan skema resi gudang, <i>database</i> transaksi dan kelembagaan Sistem	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	

		Resi Gudang sampai pembuatan laporan hasil pengawasan.				
	PF.03.01	Pengawasan Pasar Lelang Komoditas Naskah yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang meliputi tertib administrasi, tata cara pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas, data transaksi dan realisasi pasar lelang komoditas serta laporan hasil pengawasan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	
III. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK)						
1.	BK.00	Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi (pelaku pasar dan kelembagaan)				
	BK.00.00	Pemberian Izin Usaha dan Persetujuan Perdagangan Berjangka Komoditi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian izin usaha pialang berjangka, pedagang berjangka, bursa berjangka, kliring berjangka, pemberian izin wakil pialang berjangka, bank penyimpanan margin, persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka, persetujuan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), persetujuan peserta SPA, persetujuan perubahan alamat pelaku usaha PBK, pemberian perubahan nama pelaku usaha PBK, persetujuan pialang untuk penyaluran amanat nasabah	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

		bursa luar negeri, persetujuan perubahan pengurus/pemegang saham pelaku usaha PBK, persetujuan pemberhentian direktur kepatuhan, persetujuan untuk melakukan kegiatan promosi/iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang PBK, dan persetujuan lainnya di bidang PBK, mulai dari proses awal sampai akhir.				
	BK.00.01	Pencabutan Izin Pelaku Usaha dan Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan izin pelaku usaha dan kelembagaan.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
	BK.00.02	<i>Database</i> Pelaku Usaha PBK Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Database</i> Pelaku Usaha PBK.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
	BK.00.03	Pelatihan Teknis/Workshop/Sosialisasi/ <i>Focus Group Discussion</i> bagi pelaku usaha PBK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan teknis dan lain-lain bagi pelaku usaha PBK.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
	BK.00.04	Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang	Biro Pembinaan dan Pengembangan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Uji Profesi wakil pialang berjangka.			mengganggu kinerja kementerian	Perdagangan Berjangka Komoditi
2.	BK.01	Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)				Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
	BK.01.00	Pemberian Persetujuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian persetujuan mulai dari persetujuan peraturan dan tata tertib (PTT) bursa dan lembaga sampai persetujuan kontrak berjangka.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
	BK.01.01	Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis pengembangan kelembagaan dan produk PBK termasuk kegiatan pertemuan teknis, FGD, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
3.	BK.02	Pengembangan Data dan Teknologi Informasi				Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
	BK.02.00	Pengembangan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan data, seperti statistik data harga komoditi,	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

		pasar berjangka, data statistik bursa berjangka, dan pengelolaan sistem informasi harga komoditi.			kinerja kementerian	Berjangka Komoditi
	BK.02.01	Teknologi Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan panduan pengguna aplikasi, <i>Lisensi software windows server</i> , serta terkait sistem informasi lainnya.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
.4.	BK.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan PBK.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
IV. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PASAR LELANG KOMODITAS (PLK)						
1.	SP.00	Pembinaan SRG Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan PLK, <i>Focus Group Discussion</i> , dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)
2.	SP.01	Pembinaan PLK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan PLK meliputi koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait PLK, serta asistensi dan pendampingan pelaku usaha PLK.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	
3.	SP.02	Persetujuan SRG	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang	Biro Pembinaan Dan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Lembaga SRG			dapat mengganggu kinerja kementerian	Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)
4.	SP.03	Persetujuan PLK Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Lembaga PLK serta Peraturan Tata Tertib (PTT) penyelenggaraan PLK.	Terbatas	Fungsional Madya/Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)
5.	SP.04	Pengembangan SRG dan PLK				
	SP.04.00	Pengembangan Kelembagaan dan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan PLK, <i>Focus Group Discussion</i> , dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)
	SP.04.01	Kajian SRG dan PLK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan kebijakan SRG dan PLK.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)
	SP.04.02	Pengembangan Data dan Informasi	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki	Biro Pembinaan Dan

		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi di bidang SRG dan PLK serta pengelolaan sistem informasi SRG dan PLK.			dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)
6.	SP.05	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ <i>Workshop</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis SRG dan PLK, sosialisasi, <i>workshop</i> , dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)
7.	SP.06	Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SRG, PLK dan Kredit program SRG.	Biasa/Terbuka	Fungsional Muda/Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementerian	Biro Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (Srg) Dan Pasar Lelang Komoditas (Plk)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO